



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 4 Nomor 4 Tahun 2024 Page 5194-5206

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Peran Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dalam Meningkatkan
Pelayanan Publik yang Efektif dan Transparan
(Studi Kasus Pada Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kota Medan)

Rizki Hardiansyah¹, Tomi Jaffisa^{2✉}

Universitas Dharmawangsa

Email: tomi@dharmawangsa.ac.id^{2✉}

Abstrak

Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) adalah suatu sistem yang mendokumentasikan, mengadministrasikan, serta mengolah data pembangunan daerah menjadi informasi yang disajikan kepada masyarakat dan sebagai bahan pengambilan keputusan dalam rangka perencanaan, pelaksanaan, serta pelaksanaan evaluasi kinerja pemerintah daerah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Data yang diperlukan dikumpulkan melalui observasi, wawancara, serta dokumentasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dalam meningkatkan pelayanan publik yang efektif dan transparan pada BAPPEDA Kota Medan serta apa saja kendala yang dialami oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) kota Medan dalam menjalankan peran SIPD tersebut. Berdasarkan hasil dan pembahasan penelitian, kesimpulan yang dapat diambil adalah sebagai berikut: Pertama, Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) memiliki peran kunci dalam memfasilitasi partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan dan penganggaran, yang pada gilirannya meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan responsivitas pemerintah terhadap kebutuhan masyarakat. Kedua, Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) menciptakan transparansi melalui akses publik yang lebih mudah terhadap data keuangan daerah dan alokasi anggaran, serta mendorong pemerintah daerah untuk memberikan laporan yang jelas tentang penggunaan dana publik. Ketiga, penggunaan SIPD telah meningkatkan efektivitas perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah dengan mengarahkan usulan program dan kegiatan dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) serta menciptakan proses yang lebih terstruktur. Terakhir, BAPPEDA Kota Medan menghadapi beberapa kendala, terutama dalam aspek teknis seperti masalah jaringan, serta memerlukan waktu adaptasi dan menghadapi error dan bug dalam

penggunaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD). Dalam rangka mengoptimalkan peran Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dan mengatasi kendala yang dihadapi, sejumlah saran telah diajukan.

Kata Kunci: *Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD), Transparansi, Efektivitas*

Abstract

Regional Government Information System (SIPD) is a system that documents, administers, and processes regional development data into information presented to the public and as decision-making material in the framework of planning, implementation, and implementation of evaluation of local government performance. The methods used in this research are qualitative research methods. The required data is collected through observation, wawancara, as well as documentation. The research aims to understand the role of the Regional Government Information System (SIPD) in improving the efficient and transparent public service in the BAPPEDA and any obstacles encountered by the Regional Development Planning Agency (Bappeda) of the city of Medan in the performance of the SIPD role. Based on the results and discussion of the research, the conclusions can be drawn are as follows: First, the Information System of the Government of the region (Sipd) has a key role in facilitating public participation in the planning and funding process, which in turn increases transparency, accountability, and responsiveness of the government to the needs of the public. Second, the Regional Governance Information System creates transparency through easier public access to regional financial data and budget allocations, as well as encourages local governments to provide clear reports on the use of public funds. Third, use of SIPd has improved the efficiency of planning and development of the area by directing and recommending the program activities of the Organization of Regional Development (DOP) and creating more structured processes. Finally, BAPPEDA Field City faces some constraints, especially in technical aspects such as network problems, as well as requires time to adapt and face errors and bugs in the use of the Regional Government Information System. (SIPD). In order to optimize the role of the Regional Government Information System (SIPD) and overcome the obstacles encountered, a number of recommendations have been made.

Keywords: *Regional Government Information System (SIPD), Transparency, Efficiency*

PENDAHULUAN

Peningkatan efektivitas dan transparansi pelayanan publik menjadi fokus utama untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan daerah. Pelayanan publik yang efektif dan transparan menjadi kunci dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) (Fathani, Pribadi et al., 2022; Aristoni & Ismayawati, 2020; Karmanis, 2022). Namun, dalam prakteknya, masih terdapat berbagai tantangan dan permasalahan yang menghambat pencapaian tujuan-tujuan tersebut (Hanafi, 2020). Beberapa masalah yang dapat diidentifikasi termasuk ketidakmampuan menyampaikan

informasi dengan cepat, kurangnya koordinasi antarunit dalam pemerintahan daerah, serta masih adanya ketidaktransparanan dalam proses pengambilan keputusan.

Ketika informasi dipertukarkan secara bebas di berbagai proses kelembagaan dalam administrasi pemerintahan dan tersedia bagi masyarakat umum bila diperlukan, maka pemerintahan tersebut dianggap transparan (terbuka). Informasi yang tersedia dan mudah dipahami dapat dimanfaatkan sebagai alat pemantauan dan penilaian kinerja pemerintah. Unsur-unsur fungsional pemerintahan yang berhasil dan efisien dalam menjalankan tugasnya untuk mencapai tujuan tersebut merupakan bagian dari pemerintahan yang transparan (Beltahmamer, 2017).

Sistem informasi (SI) adalah sistem tenaga kerja manusia yang dibantu secara teknologi yang dirancang untuk membantu tugas-tugas administratif dan operasional. Perkembangan koneksi interaktif antara manusia, data, informasi, teknologi, dan algoritma dimaksudkan dengan hal ini. Tujuan dari pengembangan sistem informasi adalah untuk menciptakan suatu produk dengan kumpulan berbagai jenis data yang dapat diolah.

Tujuan dari sistem informasi adalah untuk memproses berbagai jenis data yang dikendalikan oleh setiap bisnis atau organisasi untuk meminimalkan kebutuhan sumber daya dan mempercepat waktu penanganan proses. Selain itu, data yang terkontrol mengurangi birokrasi yang ada dan dapat digunakan di mana saja, kapan saja. Penciptaan suatu produk yang mencakup kumpulan informasi merupakan tujuan dari pengembangan sistem informasi. Tidak diragukan lagi terdapat banyak jenis data berbeda dalam suatu sistem yang dapat dianalisis dan disajikan kepada pengguna dengan cara yang intuitif.

Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) merupakan pengelolaan informasi pembangunan daerah, informasi keuangan daerah, dan informasi pemerintahan daerah lainnya yang saling berhubungan yang digunakan dalam pelaksanaan pembangunan daerah, sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah.

Perencanaan pelaksanaan, dan penilaian kinerja pemerintah daerah semuanya difasilitasi oleh Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD), yaitu suatu sistem yang mencatat, mengelola, dan mentransformasikan data pembangunan daerah menjadi informasi yang tersedia bagi masyarakat dan digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan. Optimalisasi pemanfaatan data dan informasi terkait pembangunan daerah menjadi tujuannya.

Aplikasi SIPD terintegrasi secara berjenjang, maka dapat memudahkan penggunaannya dari level yang terendah sekalipun. Pembangunan Sistem Informasi tersebut dilatarbelakangi lemahnya pemanfaatan data-data pembangunan. Hal itu didasari pula

karena data-data pembangunan daerah tidak lengkap dan tersebar di masing-masing SKPD serta tidak diperbaharui secara berkala, kemudian Instansi yang berfungsi sebagai unit perencanaan pemerintah dalam hal ini BAPPEDA mengalami kendala dalam mengumpulkan data untuk kepentingan penyusunan perencanaan pembangunan daerah karena lemahnya koordinasi antara BAPPEDA dan SKPD di daerah (<https://pemerintah.net/> , diakses 22 Juli 2022 pada pukul 21.15 Wib).

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, khususnya melalui implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD), menjadi solusi yang diharapkan dapat mengatasi permasalahan yang masih kadang ditemukan dalam pelayanan publik (Ramadhani, Purnomo, & Kasiwi, 2020); (Herdian, 2022). SIPD diharapkan mampu meningkatkan efisiensi operasional, mempercepat alur kerja, dan meningkatkan transparansi dalam penyelenggaraan pelayanan publik (Mindarti, Saleh, & Galih, 2022). Sebuah penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Ni Ketut Sudianing dan Ketut Agus Seputra, dengan judul penelitian "Peran Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Dalam Menunjang Peningkatan Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah", menjabarkan hasil penelitiannya bahwasanya kajian tersebut merumuskan 2 (dua) kesimpulan penting yaitu : a)Pentingnya tata kelola Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) secara berkualitas dalam menunjang Perencanaan Pembangunan di daerah yang berkualitas dan b)SIPD menjadi bagian e-government memiliki fungsi kritis dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah untuk menghasilkan: 1)Pemerintahan yang responsif terhadap persoalan-persoalan daerah, 2)Peningkatan partisipasi dan demokrasi inklusif dalam perencanaan daerah; serta 3)Dapat mendorong transparansi dan keterbukaan publik di daerah.

Dari penelitian tersebut, peneliti menarik kesimpulan bahwasanya Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (SIPD) dapat memberi manfaat yang baik terhadap roda pemerintahan daerah/kota yang menerapkan SIPD tersebut. Melalui penerapannya, SIPD tersebut menjadikan pemerintah semakin responsif terhadap aspirasi dari publik, yang akhirnya hal tersebut membuktikan pemerintahannya mencapai keefektifan dan transparansinya.

Kemajuan teknologi pada era 4.0 saat ini telah dimanfaatkan oleh setiap pemerintah dalam meningkatkan kinerja serta pelayanan pemerintah terhadap publik. Dihadirkannya SIPD di kota Medan merupakan keinginan Pemko Medan yang bertujuan agar semakin mempermudah tugas Pemerintah Daerah (Pemda) dalam menghadirkan informasi terkait perencanaan dan penatausahaan keuangan (<https://medan.tribunnews.com/> , diakses pada tanggal 18 Juni 2022 pukul 17.40 WIB). Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) launching

di kota Medan melalui virtual yang dilaksanakan di Command Center, Balai Kota Medan, pada hari Senin, tanggal 28 Desember 2022).

Namun, dalam pengembangan dan implementasi SIPD, terdapat sejumlah tantangan teknis, kebijakan, dan budaya di tingkat pemerintahan daerah yang perlu diatasi. Selain itu, evaluasi terhadap efektivitas dan dampak implementasi SIPD dalam meningkatkan pelayanan publik perlu dilakukan untuk memastikan bahwa investasi ini memberikan manfaat nyata bagi masyarakat (Kristianto, Mudjihartono et al., 2012).

METODE PENELITIAN

Dalam melaksanakan penelitian, peneliti telah menetapkan untuk memilih menggunakan penelitian kualitatif. Penelitian dilakukan secara langsung pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Medan yang beralamat di Jl. Diponegoro Berdaulat Nomor 21 A, Madras Hulu, Kec. Medan Polonia, Kota Medan, Sumatera Utara 20152. Metode pengumpulan informasi dilaksanakan dengan wawancara, survei (jajak pendapat), observasi, atau perpaduan ketiganya. Teknik analisis data meliputi reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Informan dalam penelitian ini adalah:

1. Taufik Teguh Pribadi, S.Kom staf Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan
2. Herpandi, A.Md staf pada bagian Analisis Perencanaan, Evaluasi & Pelaporan
3. Irfan Hakim Ritonga, S.Sos, M.I.kom Sub Koordinator Analisis dan Pelaporan
4. Masyarakat pengguna SIPD sebanyak 3 orang antara lain:
 - Budiman (usia 35 tahun, pekerjaan Wiraswasta)
 - Nurhayati (usia 42 tahun, pekerjaan Ibu Rumah Tangga).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Partisipasi Dalam Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD)

Berdasarkan konteks ini, seorang narasumber bernama Herpandi, A.Md yang merupakan staf pada bagian Analisis Perencanaan, Evaluasi & Pelaporan BAPPEDA kota Medan, memaparkan siapa saja pihak terkait yang berpartisipasi serta dapat mengakses aplikasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD).

“Sistem Informasi Pembangunan Daerah atau SIPD ini adalah salah satu alat yang penting sekali untuk membantu proses pembangunan di daerah ya, kota Medan khususnya, terutama kalo bicara soal data yang benerbener valid untuk analisis perencanaan pembangunan dan pemetaan. SIPD ini tujuannya untuk semua pemerintah provinsi serta kabupaten/kota di seluruh Indonesia nggak hanya di kota

Medan. Lewat SIPD, pemerintah pusat bisa cek secara detail gimana duit anggaran daerah dipake, sampe ada alokasi buat rapat, makan minum, dan perjalanan dinas. Harapannya, masyarakat bisa pakai SIPD untuk melihat dan membantu kasih saran soal anggaran dan program daerah.”

Pernyataan lainnya juga disampaikan oleh Taufik Teguh Pribadi, S.Kom sebagai staf Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan terkait partisipasi dalam Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD).

“SIPD ini salah satu sistem informasi pemerintah daerah yang prosesnya itu transparan. Tentu ygng berpartisipasi adalah stakeholder ya sudah pasti, kemudian Masyarakat, dan pelaku usaha. Alurnya pun teratur. Selain itu setiap kelurahan mempunyai akun yang bisa dibagikan ke Masyarakat untuk Masyarakat bisa memantau sendiri sistem tersebut. Bahkan bisa untuk meng-input usulan. Prosedurnya tentu jelas. Nanti akan saya kasi data teknisnya.”

Transparansi Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD)

Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) dihadirkan pemerintah tentu karena ingin mewujudkan transparansi dalam pengelolaan anggaran belanja daerah serta dapat meningkatkan pelayanan publik disetiap daerah. Irfan Hakim Ritonga, S.Sos, M.I.kom sebagai Sub Koordinator Analisis dan Pelaporan menyampaikan informasi seperti berikut ini:

“SIPD ini jelas arahnya adalah untuk mewujudkan pelayanan publik yang transparan dan efektif. Tujuan SIPD itu sendiri adalah pihak pemerintah itu punya tugas menyediakan info buat masyarakat supaya tau apa yang lagi diurus sama pemerintahan daerah. Selain itu, SIPD ini akan membuat layanan info pemerintahan daerah yang bisa nyambung-nyambung dan menjalankannya itu secara elektronik jadi memberi kemudahan untuk diakses. Dan yang terpenting, ini dapat meningkatkan tata kelola pemerintahan yang bisa akuntabel, supaya semuanya jadi lebih efektif dan efisien.”

Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) yang transparan tidak hanya memberikan manfaat bagi masyarakat umum namun juga terhadap stakeholder seperti yang disampaikan oleh Taufik Teguh Pribadi, S.Kom sebagai staf Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan.

“Kalau soal transparan sudah jelas ini SIPD pasti transparan. Manfaatnya tidak hanya untuk stakeholder tapi juga mengusung keterbukaan kepada masyarakat. Selain itu, nggak ada lagi itu biaya-biaya kegiatan mendadak, karena semuanya harus

direncanakan. Semua kegiatan sebelum dilakukan akan direncanakan sebaik mungkin agar tidak terjadi anggaran yang keluar banyak atau duplikasi anggaran.”

Pernyataan lain juga ditambahkan oleh Herpandi, A.Md yang merupakan staf pada bagian Analisis Perencanaan, Evaluasi & Pelaporan terkait transparansi Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD)

“SIPD atau Sistem Informasi Pemerintah Daerah diluncurkan tentu karena ada urgensi yang harus segera ditangani ya. Seperti kebutuhan akan akuntabilitas dan transparansi pemerintahan, lalu sebagai gebrakan baru dalam mengikuti era 4.0 sekarang ini. SIPD ini dalam proses kerjanya itu terstruktur. Pemerintah pusat akan selalu melakukan monitoring sebelum usulan setiap SKPD itu disetujui. Kemudian urusan daerah dalam transaksi dengan bank yang bekerjasama akan lebih mudah dan tetap terkontrol. Saya rasa SIPD ini lebih mudahnya dalam melakukan analisa keluar masuk keuangan daerah. Jadi memang SIPD ini sangat-sangat transparansi karena pemerintah pusat selalu mengontrol.”

Pernyataan oleh narasumber di atas menjelaskan tentang peluncuran Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) dan alasan urgensi di baliknya. SIPD diperkenalkan sebagai respons terhadap beberapa permasalahan dan kebutuhan yang mendesak dalam pemerintahan daerah.

1. Salah satu alasan utama peluncuran SIPD adalah untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam pemerintahan daerah. Dengan adanya SIPD, informasi keuangan dan aktivitas pemerintah daerah dapat lebih mudah diakses dan dipahami oleh masyarakat, sehingga mengurangi potensi penyimpangan dan penyalahgunaan keuangan publik.
2. SIPD juga dihadirkan sebagai langkah menuju era 4.0, di mana teknologi informasi memiliki peran penting dalam transformasi pemerintahan. Dengan memanfaatkan teknologi canggih, pemerintah daerah dapat meningkatkan efisiensi, produktivitas, dan kualitas layanan kepada masyarakat
3. SIPD dirancang dengan proses kerja yang terstruktur. Ini berarti setiap langkah dan transaksi dalam sistem memiliki aturan dan prosedur yang jelas, sehingga meminimalkan peluang kesalahan dan penyalahgunaan.
4. Pemerintah pusat terlibat aktif dalam memantau operasional SIPD. Mereka melakukan evaluasi sebelum menyetujui usulan dari setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Hal ini membantu memastikan kepatuhan dan kualitas data yang masuk ke sistem.
5. SIPD juga dimaksudkan untuk menyederhanakan transaksi keuangan daerah dengan bank yang bekerjasama. Ini berarti urusan keuangan daerah dapat lebih mudah diatur

dan tetap dalam kontrol, mengurangi risiko ketidakpastian dalam pengelolaan keuangan daerah.

6. SIPD dapat memfasilitasi analisis yang lebih mudah terkait dengan masuk dan keluar keuangan daerah. Data yang terdokumentasi dengan baik dalam sistem ini dapat digunakan untuk membuat keputusan yang lebih baik terkait alokasi sumber daya.
7. Pemerintah pusat selalu terlibat dalam pengontrolan, yang meningkatkan tingkat transparansi. Masyarakat dan pemangku kepentingan dapat memantau aktivitas pemerintah daerah dengan lebih baik.

Berdasarkan hasil wawancara dan beberapa data yang telah ada di atas, dapat diketahui bahwasanya penerapan Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) sangatlah transparan. Kemudian, dengan adanya skema pengguna SIPD maka tidak ada lagi bentuk kecurangan-kecurangan dalam proses pemerintahan daerah karena harus mengikuti alur yang telah terstruktur tersebut.

Akuntabilitas Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD)

Herpandi, A.Md, staf bagian Analisis Perencanaan, Evaluasi & Pelaporan menyatakan bahwa SIPD memiliki dasar hukum yang jelas dan akurat sehingga seluruh daerah wajib untuk mengadopsinya.

"SIPD ini juga ada dasar hukumnya yang jelas dan tentu kalau sudah ada dasar hukumnya jelas itu akurat. Ada pasal 391 dan 395 UU nomor 23 tahun 2014, trus ada Perpres tentang SPBE sama SDI."

Dalam konteks ini, Taufik Teguh Pribadi, S.Kom sebagai staf Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan mengatakan bahwa:

"Kalau untuk di BAPPEDA khususnya untuk pelayanan publik sendiri semenjak ada SIPD itu sudah semakin membaik tentunya. Sudah banyak kita mengadopsi teknologi informasi dalam memberikan pelayanan yang dampaknya itu akan secara langsung bisa dirasakan sama Masyarakat kota Medan. Sebelumnya kita sendiri di BAPPEDA kita sudah punya sistem informasi yaitu e-DevPlan yang dimanfaatkan untuk perencanaan yang bisa memudahkan kita untuk membuat perencanaan dalam Pembangunan kota dan termasuk juga wadah usulan Masyarakat yang bisa langsung disampaikan atau memonitoring usulan terkait kegiatan Pembangunan jalan contohnya, drainase, dan lain-lain. Ini kita masih gunakan sampai sekarang. Lalu pemerintah pusat mengeluarkan SIPD dengan tujuan untuk melihat secara langsung perencanaan disetiap daerah. Tentu pelaksanaan dan penatausahaannya akan lebih akuntabel karena siklusnya jelas, yang bertanggungjawab dari bagian ini ke bagian itu sudah

diatur sedemikian rupa oleh Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah KEMENDAGRI.”

Berdasarkan pernyataan narasumber di atas, peneliti akan melampirkan data yang menampilkan siklus pelaksanaan dan penatausahaan keuangan daerah yang akan menunjukkan akuntabilitas Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) yang saat ini telah diadopsi dan diberlakukan di BAPPEDA Kota Medan.

Kemudian ditambahkan juga oleh Herpandi, A.Md tentang pelaksanaan dan penatausahaan pendapatan daerah dalam SIPD dimana bendahara wajib melakukan pencatatan dan pembukuan terkait penerimaan daerah.

“Di SIPD ini juga ada itu kebijakan tentang kewajiban bendahara untuk mencatat dan melakukan pembukuan terhadap pendapatan daerah. Dengan begitu nggak ada lagi istilahnya kesalahan yang tidak akan diketahui pemerintah pusat terkait keuangan di setiap daerah karena jelas ada pembukuannya di SIPD tadi. Saat Pemda menerima pendapatan dari berbagai sumber, selanjutnya pendapatan itu akan disetorkan ke rekening kas umum daerah, dicatat, dan dibukukan karena ada LPJ yang harus dipertanggungjawaban dan disampaikan kepada DPRD.”

Efektivitas Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD)

Dalam bahasan ini, informan yang bernama Taufik Teguh Pribadi, S.Kom memaparkan bahwa meskipun Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) dibuat oleh Pemerintah pusat dengan tujuan untuk mewujudkan transparansi, akuntabilitas, serta efektivitas dalam perencanaan pembangunan daerah.

“Kalau sekarang bisa dibilang efektif ya karena sudah berjalan beberapa tahun ini kita gunakan di BAPPEDA. Karna sebelumnya pun kita sudah punya aplikasi e-DevPlan yang dipakai untuk perencanaan pembangunan daerah. Namun memang e-DevPlan ini masih satu arah ya nggak bisa masyarakat mengaksesnya. Setelah 2021 kemarin mulai diperkenalkan SIPD ini untuk dipakai karna tuntutan dari pusat, kalau efektif saya rasa cukup efektif. Walaupun memang masih belum sepenuhnya bagus menurut saya ya karena sering ada bug dan itu agak mengganggu pekerjaan kawan-kawan.”

Kemudian, informan bernama Herpandi, A.Md menambahkan bahwa hadirnya Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) selain untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas, aplikasi ini juga cukup efektif digunakan sebagai wadah perencanaan pembangunan daerah karena penataan usulan-usulan kegiatan dari OPD sudah terarah sesuai dengan tugas dan fungsi dari OPD terkait.

"Cukup efektif menurut saya. Karena tujuannya untuk meningkatkan kualitas pelayanan terhadap publik karena mengutamakan transparansi serta akuntabel. Mengapa saya bilang demikian? Karena untuk penataan usulan-usulan kegiatan dari OPD-OPD itu sudah jelas diatur arahnya sesuai tugas dan fungsinya. Sehingga tidak ada lagi OPD yang sembarangan atau mendadak-mendadak untuk memberikan usulan kegiatan sebab harus mengikuti prosedur yang sudah ditetapkan dalam SIPD tadi."

Berdasarkan informasi narasumber, SIPD atau Sistem Informasi Pemerintah Daerah dianggap efektif dalam perencanaan pembangunan daerah. Dalam penggunaannya selama beberapa tahun di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA), SIPD dinilai lebih efektif daripada aplikasi sebelumnya, e-DevPlan yang dimiliki oleh BAPPEDA Kota Medan, karena masih bersifat satu arah, berbeda dengan SIPD.

Kemudian, peneliti juga mempertanyakan bagaimana tingkat kesulitan yang dihadapi oleh para pegawai dalam memanfaatkan Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) tersebut. Taufik Teguh Pribadi, S.Kom mengatakan bahwa:

"Untuk tingkat kesulitannya saya rasa tidak sulit karena sudah ada modul yang bisa dipelajari dan itu cukup jelas menurut saya. Lalu SIPD ini cukup memberi kemudahan karena untuk mendokumentasikan program kerja yang diusulkan oleh masing-masing OPD itu dalam bentuk softcopy yang kemudian bisa dikonversi ke PDF."

Narasumber lainnya yang bernama Irfan Hakim Ritonga, S.Sos, M.I.kom menambahkan:

"Aplikasi SIPD yang sekarang sudah diterapkan di BAPPEDA cukup memudahkan dan menghemat biaya karena tidak ada mobilitas. OPD-OPD yang ingin memberikan usulan bisa langsung mengakses SIPD dan usulannyapun tidak perlu hardcopy. Cukup memasukkan saja di SIPD dan akan dicrosscek oleh BAPPEDA serta pemerintah pusat."

Tanggapan Masyarakat Terhadap Peran SIPD Dalam Pelayanan Publik

Tanggapan mengacu pada respons atau reaksi dari individu atau kelompok terhadap suatu stimulus atau situasi tertentu. Dalam konteks penerapan Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD), tanggapan masyarakat merujuk pada pandangan, perasaan, dan evaluasi mereka terhadap efektivitas, transparansi, dan keberlanjutan sistem tersebut dalam meningkatkan pelayanan publik dan mengelola pembangunan di tingkat pemerintahan daerah.

1. Budiman (35 tahun, Wiraswasta)

"Kepentingannya adalah untuk mengetahui informasi tentang layanan publik"

- Bagaimana tanggapan bapak terhadap peran SIPD dalam pelayanan publik di Kota Medan?
SIPD itu sistem informasi yang sangat berguna lah buat masyarakat Medan. Dengan adanya SIPD, masyarakat bisa akses informasi pelayanan publik dengan lebih mudah dan transparan. Hal ini tentunya bisa meningkatkan kualitas pelayanan publik di Kota Medan.
- Apakah ada kendala yang bapak alami dalam menggunakan SIPD?
Kendala yang saya alami dalam menggunakan SIPD adalah masih kurangnya sosialisasi dari pemerintah. Banyak masyarakat yang belum mengetahui tentang SIPD dan cara menggunakannya. Selain itu, masih ada beberapa instansi pemerintah yang belum sepenuhnya menerapkan SIPD.
- Apa saran bapak untuk meningkatkan efektivitas SIPD dalam pelayanan publik?
Untuk meningkatkan efektivitas SIPD dalam pelayanan publik, pemerintah perlu melakukan sosialisasi yang lebih luas kepada masyarakat. Selain itu, pemerintah juga perlu mendorong instansi pemerintah untuk menerapkan SIPD secara menyeluruh.

2. Nurhayati (42 tahun, Ibu Rumah Tangga)

“Kepentingannya adalah untuk mendapatkan pelayanan kesehatan”

- Bagaimana tanggapan ibu terhadap peran SIPD dalam pelayanan publik di Kota Medan?

Sejujurnya, aku baru tau SIPD sekitar setahun yang lalu. Awalnya, aku ragu menggunakannya karena tidak terbiasa dengan teknologi. Namun, setelah dicoba ternyata SIPD cukup mudah digunakan, terutama untuk mengecek jadwal dan lokasi posyandu anak aku. Aku juga pernah menggunakan SIPD untuk mendaftar Kartu Indonesia Sehat (KIS) secara online. Prosesnya lancar dan tidak berbelit-belit. Sekarang aku merasa lebih terbantu dengan adanya SIPD, apalagi untuk urusan administrasi yang biasanya memakan waktu lama.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa peran Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) dalam meningkatkan pelayanan publik adalah memfasilitasi partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan dan penganggaran yang memungkinkan mereka bisa memberikan masukan dan saran atau usulan kegiatan. Hal tersebut tentu meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan responsivitas pemerintah

terhadap kebutuhan masyarakat. Selanjutnya, Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) menciptakan transparansi dengan menyediakan akses publik yang lebih mudah ke data keuangan daerah dan alokasi anggaran, serta sistem ini memaksa pemerintah daerah untuk memberikan laporan yang jelas dan terperinci tentang penggunaan dana publik, menciptakan akuntabilitas dalam pengelolaan dana daerah. Kemudian penggunaan Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) telah memperbaiki efektivitas perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah. Sistem ini membantu mengarahkan usulan program dan kegiatan dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan menciptakan proses yang lebih terstruktur dan efisien. Terakhir, BAPPEDA Kota Medan menghadapi beberapa kendala dalam penggunaan Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD). Kendala teknis, terutama yang terkait dengan masalah jaringan, menjadi salah satu tantangan utama yang dapat memengaruhi kinerja dan ketersediaan SIPD. Selain itu, waktu yang dibutuhkan untuk beradaptasi dengan SIPD, masalah seperti error dan bug dalam penggunaan SIPD.

DAFTAR PUSTAKA

- Aristoni & Ismayawati, Any. (2020). Implementasi Pemerintah Daerah Dalam Pengembangan Model Pelayanan Publik Berbasis Sistem Informasi Desa Pada Pemerintahan Desa Di Kabupaten Jepara Perspektif Islam Terapan. YUDISIA : Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam. Volume 11, Nomor 1, Juni 2020
<https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/Yudisia/index>
- Beltahmamero, S. (2017). Inovasi Pelayanan Pemerintahan Desa Melalui E-Government (Studi Penelitian Deskriptif Kualitatif Di Desa Penggunharjo, Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta).
<https://www.semanticscholar.org/paper/42ded807fb6539b5ae7e01e7cfbead999ccb451>
- Fathani, Aqil Teguh., Pribadi, Ulung., Suling, Cindy Fabrizia., Azmi, Novia Amirah. (2022). Pemanfaatan Sistem Informasi Desa (SID) terhadap Peningkatan Pelayanan Publik di Desa Dlingo, Bantul. JUSTIN: Jurnal Sistem dan Teknologi Informasi. Vol. 10, No. 1.
<https://dx.doi.org/10.26418/justin.v10i1.44347>
- Hanafi, M. (2020). Pelayanan Publik Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Melalui Efektivitas Content Website. , 17, 156-170.
<https://doi.org/10.21831/efisiensi.v17i2.30486>.
- Herdian, C. (2022). Analisis dan Desain Sistem Informasi Pelatihan Dalam Mewujudkan Good Governance di Kabupaten Subang (Studi Kasus: Lembaga Ilmu Pengetahuan

- Indonesia Pusat Pengembangan Teknologi Tepat Guna). *The World of Public Administration Journal*. <https://doi.org/10.37950/wpaj.v4i1.1343>.
- Karmanis, K. (2022). Urgensi Reformasi Administrasi Dalam Citizen-Centric, Dan E-Government Di Indonesia. *Public Service and Governance Journal*. <https://doi.org/10.56444/psgj.v3i01.2787>.
- Kristianto, K., Mudjihartono, P., & Sinaga, B.L. (2012). Analisis Dan Usulan Perbaikan Sistem Informasi Manajemen Aset Bergerak Di Pemerintah Daerah Kabupaten Sanggau. <https://www.semanticscholar.org/paper/ANALISIS-DAN-USULAN-PERBAIKAN-SISTEM-INFORMASI-ASET-Kristianto-Mudjihartono/4969ded15b14f351e54556d9072834d411effdea>
- Mindarti, L., Saleh, C., & Galih, A. (2022). Penerapan Inovasi Sistem Informasi Manajemen Guna Mewujudkan Keterbukaan Informasi Publik. *JMM (Jurnal Masyarakat Mandiri)*. <https://doi.org/10.31764/jmm.v6i1.6336>.
- Ni Ketut Sudianing dan Ketut Agus Seputra. (2019). *Peran Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Dalam Menunjang Peningkatan Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah*. Universitas Panji Sakti Singaraja dan Universitas Ganesha Singaraja.
- Ramadhani, R., Purnomo, E., & Kasiwi, A. (2020). E-Government Assessment pada Kualitas Aplikasi Jogja Smart Service (JSS) di Kota Yogyakarta. , 5. <https://doi.org/10.36982/jpg.v5i2.1031>.